Laporan Keuangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Pekanbaru Tahun 2021 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2021.

Realisasi Pendapatan Negara sampai dengan 31 Desember 2021 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp77.308.637 atau mencapai 0 persen dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp0.
Realisasi Belanja Negara sampai dengan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp16.785.843.001 atau mencapai 99,18 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp16.924.965.000.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas sampai dengan 31 Desember 2021. Nilai Aset sampai dengan 31 Desember 2021 dicatat dan disajikan sebesar Rp248.685.591.533 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp25.881.991; Piutang Jangka Panjang (neto) sebesar Rp0; Aset Tetap (neto) sebesar Rp240.670.470.895; dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp0.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp18.728.076 dan Rp240.685.591.533.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan 'untuk penyajian yang wajar.

Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp78.702.161, sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah sebesar Rp27.471.002.717 sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai (Rp27.392.300.556). Surplus dari Kegiatan Non Operasional dan Defisit Pos-Pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp5.213.078 dan Rp0 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar (Rp27.387.087.478).

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp245.294.285.663 ditambah Defisit-LO sebesar (Rp27.387.087.478) kemudian ditambah dengan koreksi-koreksi senilai Rp2.611.148.136 dan Transaksi Antar Entitas senilai Rp27.685.123.350 sehingga Ekuitas entitas sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 adalah senilai Rp248.203.469.671.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2021 disusun dan disajikan dengan menggunakan basis akrual.

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RIAU
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 Desember 2021

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	TA 2020		% thd Angg	TA 2019
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
PENDAPATAN					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	-	117.944.174	0	300.938.633
JUMLAH PENDAPATAN		**-**	**117.944.174**	**0**	**300.938.633**
BELANJA	B.2.				
Belanja Pegawai	B.3	8.420.180.000	8.313.270.698	98,73	8.386.312.004
Belanja Barang	B.4	17.640.660.000	17.579.527.679	99,65	3.791.356.451
Belanja Modal	B.5	1.724.555.000	1.641.472.175	95,18	
Belanja Bantuan Sosial	B.6	-	-	0	-
JUMLAH BELANJA		**27.785.395.000**	**27.534.270.552**	99,10	**12.177.668.455**

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RIAU
NERACA
PER 31 Desember 2021 DAN TAHUN 2020

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 DESEMBER 2020	2019
ASET			
ASET LANCAR			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1		-
Kas di Bendahara Penerimaan	C.2	-	-
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.3	-	-
Piutang Bukan Pajak	C.4	-	-
Bagian Lancar TP/TGR	C.5	870.000	5.220.000
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	C.6	-	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lancar	C.7	(4.350)	(26.100)
Belanja Dibayar di Muka	C.8	-	-
Persediaan	C.9	20.309.383	41.554.490
Persediaan yang Belum Diregister	C.10	-	-
Jumlah Aset Lancar		21.175.033	46.748.390
PIUTANG JANGKA PANJANG			
Tagihan TP/TGR	C.11	-	435.000
Tagihan Penjualan Angsuran	C.12	-	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jangka Panjang	C.13	-	(2.175)
Jumlah Piutang Jangka Panjang		-	432.825
ASET TETAP			
Tanah	C.14	238.796.613.000	236.551.186.000
Peralatan dan Mesin	C.15	11.565.134.198	11.300.004.760
Gedung dan Bangunan	C.16	11.113.907.175	9.318.135.000
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	C.17	-	-
Aset Tetap Lainnya	C.18	112.181.660	96.181.660
Konstruksi dalam pengerjaan	C.19	-	-
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.20	(13.370.162.861)	(12.017.481.451)
Jumlah Aset Tetap		248.217.673.172	245.248.025.969
ASET LAINNYA			
Aset Tidak Berwujud	C.21	-	-
Aset Lain-Lain	C.22	323.497.518	189.633.250
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	C.23	(323.497.518)	(189.633.250)
Jumlah Aset Lainnya		-	-
JUMLAH ASET		**248.238.848.205**	**245.295.207.184**
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Uang Muka dari KPPN	C.24		-
Utang kepada Pihak Ketiga	C.25	-	-
Pendapatan Diterima di Muka	C.26	35.378.534	921.521
Beban yang Masih Harus Dibayar	C.27	-	-
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		35.378.534	921.521
JUMLAH KEWAJIBAN		35.378.534	921.521
EKUITAS			
Ekuitas	C.28	248.203.469.671	245.294.285.663
JUMLAH EKUITAS		248.203.469.671	245.294.285.663
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		**248.238.848.205**	**245.295.207.184**

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RIAU
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE SAMPAI DENGAN 31 Desember 2021 (*Dalam Rupiah*)

URAIAN	CATATAN	31 DES 2020	2019
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.1	78.702.161	71.754.770
JUMLAH PENDAPATAN		**78.702.161**	**71.754.770**
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2	8.313.270.698	8.386.312.004
Beban Persediaan	D.3	214.711.570	101.409.995
Beban Barang dan Jasa	D.4	15.540.445.467	2.012.008.527
Beban Pemeliharaan	D.5	803.998.027	858.349.453
Beban Perjalanan	D.6	1.046.830.800	790.865.707
Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	D.7	-	-
Beban Bantuan Sosial	D.8	-	-
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.9	1.551.770.080	1.773.906.465
Beban Penyisihan Piutang Tak	D.10	(23.925)	28.275
JUMLAH BEBAN		**27.471.002.717**	13.922.880.426
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN		(27.392.300.556)	(13.851.125.656)
KEGIATAN NON OPERASIONAL	D.11		
Surplus Penjualan Aset Nonlancar		-	177.789.000
Defisit Penjualan Aset Non Lancar		-	-
Defisit Selisih Kurs		-	-
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		8.702.804	22.264.592
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		3.489.726	8.680.860
SURPLUS /DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		5.213.078	13.583.732
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS		(27.387.087.478)	(13.659.752.924)
POS LUAR BIASA	D.12		
Pendapatan PNBP		-	-
Beban Perjalanan Dinas		-	-
Beban Persediaan		-	-
SURPLUS/DEFISIT LO		**(27.387.087.478)**	**(13.659.752.924)**

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RIAU
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE SAMPAI DENGAN 31 Desember 2021

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 DESEMBER 2020	2019
EKUITAS AWAL	E.1	245.294.285.663	246.945.236.564
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	(27.387.087.478)	(13.659.752.924)
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	E.3	2.611.148.136	(89.402.576)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR	E.3.1	-	-
PENYESUAIAN NILAI ASET	E.3.2	-	-
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	E.3.3	-	-
SELISIH REVALUASI ASET TETAP	E.3.4	(29.399.000)	-
KOREKSI NILAI ASET TETAP NON REVALUASI	E.3.5	2.640.547.136	(136.830.407)
KOREKSI LAIN-LAIN	E.3.6	-	47.427.831
JUMLAH		**2.611.148.136**	(89.402.576)
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.4	27.685.123.350	12.098.204.599
EKUITAS AKHIR	E.5	**248.203.469.671**	**245.294.285.663**

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Pekanbaru

Dasar Hukum Entitas dan Rencana Strategis

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Pekanbaru didirikan sebagai salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Pekanbaru mempunyai tugas dan fungsi dalam melakukan koordinasi di bidang bimbingan dan dukungan implementasi akuntansi pemerintah dengan cakupan wilayah Provinsi Riau. Melalui peran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Pekanbaru diharapkan kualitas laporan keuangan K/L dapat ditingkatkan yang pada akhirnya Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dapat disajikan dengan akuntabel, akurat, dan transparan.

Untuk mewujudkan tujuan di atas, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Pekanbaru berkomitmen dengan visi:

"mewujudkan pelaksanaan penyelenggaraan keuangan negara yang efisien, akuntabel, dan transparan melalui implementasi akuntansi pemerintah berbasis akrual."

Untuk mewujudkan visi tersebut, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Pekanbaru melakukan langkah-langkah strategis sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan usaha-usaha yang berkelanjutan berkaitan dengan implementasi akuntansi pemerintah berbasis akrual.

2. Membina secara efektif Kementerian Negara/Lembaga dalam pemanfaatan informasi keuangan yang dihasilkan oleh sistem akuntansi berbasis akrual yang diimplementasikan.
3. Mengembangkan sistem informasi yang andal dan terpercaya.
4. Menyelenggarakan sistem dukungan pengambilan keputusan kepada para pemangku kepentingan.

Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun 2021 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Pekanbaru. Laporan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

Laporan Keuangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Pekanbaru Tahun 2021 ini merupakan laporan konsolidasi dari seluruh jenjang struktural di bawah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Pekanbaru yang bertanggung jawab atas anggaran yang diberikan.

Basis Akuntansi

A.3. Basis Akuntansi

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Pekanbaru menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh

transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang yang mengakui pengaruhi transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Dasar Pengukuran

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Pekanbaru dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

Kebijakan Akuntansi

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2021 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan

prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatuentitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan. Di samping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Pekanbaru adalah sebagai berikut:

Pendapatan-LRA

(1) Pendapatan- LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Pendapatan-LO

(2) Pendapatan- LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara

khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut:

- Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan
- Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
- Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan

- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam peride tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi

berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

a. Aset Lancar

- Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihan atau yang dipersamakan, yang diharapkan diterima pengembaliannya dalam waktu 12 (dua belas)

bulan setelah tanggal pelaporan.

- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan 2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	100%

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:

- harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
- harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
- harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
  a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
  b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
  c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin

berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.

- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

Penyusutan Aset Tetap

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan No.01/PMK.06/2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan No.90/PMK.06/2014 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
  a. Tanah
  b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
  c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan

mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.

- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

d. Piutang Jangka Panjang

Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

Aset Lainnya

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset

lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.

- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi. Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	**Masa Manfaat (tahun)**
Software Komputer	4
Franchise	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10
Hak Ekonomi Lembaga	20

Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Kewajiban

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Pekanbaru telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja adalah sebagai berikut:

Uraian	31 DESEMBER 2020	
	ANGGARAN AWAL	ANGGARAN SETELAH REVISI
Pendapatan		
Penerimaan Negara Bukan Pajak	-	-
Jumlah Pendapatan	-	-
Belanja		
Belanja Pegawai	8.420.180.000	8.420.180.000
Belanja Barang	17.640.660.000	17.640.660.000
Belanja Modal	1.724.555.000	1.724.555.000
Belanja Bantuan Sosial	0	0
Jumlah Belanja	**27.785.395.000**	**27.785.395.000**

Realisasi Pendapatan Rp78.702.161

B.1 PENDAPATAN

Realisasi Pendapatan untuk periode sampai dengan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp78.702.161 atau mencapai 0 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp0. Pendapatan di lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Pekanbaru berasal dari Pendapatan Negara Bukan Pajak.

Rincian estimasi pendapatan dan realisasinya dapat dilihat sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan TA 2021

Uraian	2020		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Pendapatan dari Pengelolaan BMN	-	40.275.000	-
Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerug	-	-	-
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai	-	4.521.180	
Penerimaan Kembali Belanja Barang	-	33.905.981	-
Jumlah	**-**	**78.702.161**	**-**

Realisasi Pendapatan dari Pengelolaan BMN sampai dengan 31 Desember 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp40.275.000 dibandingkan realisasi TA 2020. Hal ini disebabkan pembayaran atas sewa tanah untuk dipergunakan sebagai ATM BNI.

Realisasi Pendapatan Jasa sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar (Rp0) dibandingkan realisasi TA 2020. Realisasi Pendapatan Iuran dan Denda sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp0.

Selain itu terdapat penurunan Pendapatan Lain-lain dari Rp177.319menjadi Rp0,- dibandingkan realisasi TA 2020. Hal ini terjadi karena tidak terdapat Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu, dan Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu.

Perbandingan Realisasi Pendapatan 31 Desember 2021 dan Tahun 2020

URAIAN	REALISASI 31 DESEMBER 2020	REALISASI T.A. 2019	NAIK (TURUN) %
Pendapatan dari Pengelolaan BMN	40.275.000	-	100,00
Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugia	-	-	0,00
Pendapatan Iuran dan Denda	-	-	0,00
Pendapatan Lain-lain	-	177.319	-100,00
Jumlah	**40.275.000**	**177.319**	**99,56**

Realisasi Belanja Negara Rp27.534.270.552

B.2. BELANJA

Realisasi Belanja sampai dengan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp27.534.270.552 atau 99,10% dari anggaran belanja sebesar Rp27.785.395.000. Rincian anggaran dan realisasi belanja sampai dengan 31 Desember 2021 tersaji sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Belanja Sampai Dengan 31 Desember 2021

Uraian	2020		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Belanja Pegawai	8.420.180.000	8.313.270.698	98,73
Belanja Barang	17.640.660.000	17.579.527.679	99,65
Belanja Modal	1.724.555.000	1.641.472.175	95,18
Belanja Bantuan Sosial	-	-	
Total Belanja Kotor	**27.785.395.000**	**27.534.270.552**	99,10
Pengembalian Belanja	-	-	
Total Belanja	**27.785.395.000**	**27.534.270.552**	99,10

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam grafik berikut ini:

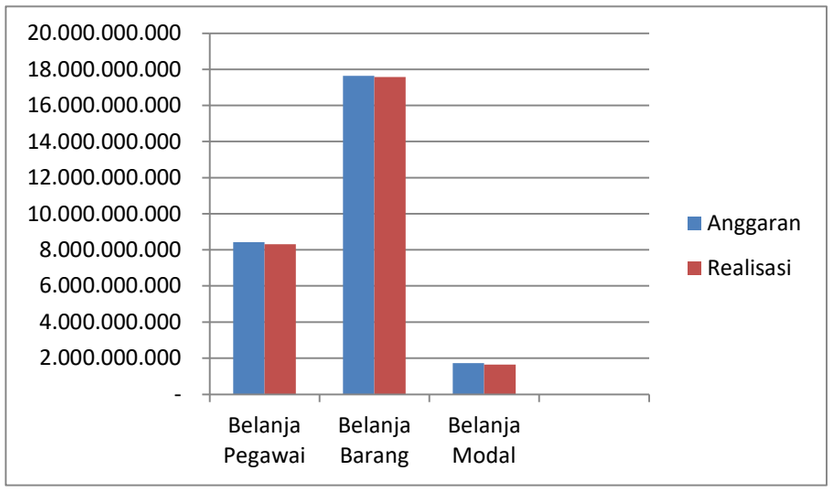

Realisasi Belanja sampai dengan 31 Desember 2021 mengalami kenaikan sebesar 126.10 persen dibandingkan realisasi belanja pada TA 2020. Hal ini disebabkan kenaikan anggaran belanja barang dan modal pada TA 2020.

Perbandingan Realisasi Belanja 31 Desember 2021 dan TA 2020

URAIAN	REALISASI 31 DESEMBER 2020	REALISASI T.A. 2019	NAIK (TURUN) %
Belanja Pegawai	8.313.270.698	8.386.312.004	(0,87)
Belanja Barang	17.579.527.679	3.791.356.451	363,67
Belanja Modal	1.641.472.175	-	100,00
Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
Jumlah	**27.534.270.552**	**12.177.668.455**	**126,10**

Belanja Pegawai Rp8.313.270.698

B.3 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai sampai dengan 31 Desember 2021 dan Tahun 2020 adalah masing-masing sebesar Rp8.313.270.698. dan Rp8.386.312.004. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil

(PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Berdasarkan tabel perbandingan belanja pegawai, realisasi belanja sampai dengan 31 Desember 2021 mengalami kenaikan sebesar 15,00 persen dari realisasi belanja TA 2020. Hal ini disebabkan antara lain adanya kenaikan gaji pegawai dikarenakan kenaikan pangkat dan golongan.

Perbandingan Belanja Pegawai Tahun 2021 dan TA 2020

URAIAN	REALISASI TA 2020	REALISASI TA 2019	NAIK (TURUN) %
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	8.267.382.492	8.307.977.248	-48,86%
Belanja Gaji dan Tunjangan Non PNS	0	0	-
Belanja Honorarium	0	0	-
Belanja Lembur	46.629.000	80.008.000	-41,72%
Belanja Vakasi	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	**8.314.011.492**	**8.387.985.248**	**-88,19%**
Pengembalian Belanja Pegawai	740.794	1.673.244	-55,73%
Jumlah Belanja	**8.313.270.698**	**8.386.312.004**	**-0,87%**

Belanja Barang

Rp17.579.527.679

B.4 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang sampai dengan 31 Desember 2021 dan Tahun 2020 adalah masing-masing sebesar Rp15.933.332.137 dan Rp2.935.576.552. Realisasi Belanja Barang sampai dengan 31 Desember 2021 mengalami kenaikan 81,58% dari Realisasi Belanja Barang TA 2020.

Perbandingan Belanja Barang Tahun 2021 dan TA 2020

URAIAN	REALISASI TA 2020	REALISASI TA 2019	NAIK (TURUN) %
Belanja Barang Operasional	3.355.921.398	1.261.632.567	62,41%
Belanja Barang Non Operasional	458.816.560	28.000.000	93,90%
Belanja Barang Persediaan	206.477.182	124.144.800	39,87%
Belanja Jasa	11.725.707.509	367.853.960	96,86%
Belanja Pemeliharaan	785.774.230	864.337.417	-10,00%
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	1.046.830.800	289.607.808	72,33%
Belanja Barang untuk diserahkan kepada Masy.	-	-	0%
Jumlah Belanja Kotor	**17.579.527.679**	**2.935.576.552**	83,30%
Pengembalian Belanja	-	-	0%
Jumlah Belanja	**17.579.527.679**	**2.935.576.552**	**83,30%**

Belanja Modal

Rp1.641.472.175

B.5 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal sampai dengan 31 Desember 2021 dan TA 2020 adalah masing-masing sebesar Rp1.641.472.175. dan Rp0 Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

B.5.1 Belanja Modal Tanah

Tidak terdapat Belanja Modal Tanah TA 2021 dan TA 2020.

B.5.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal TA 2021 dan TA 2020 adalah masing-masing sebesar Rp40.325.000 dan Rp0.

B.5.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal TA 2021 dan TA 2020 adalah masing-masing sebesar Rp1.601.147.175. dan Rp0.

B.5.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Tidak terdapat Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan TA 2021 dan TA 2020.

B.5.5 Belanja Modal Lainnya

Tidak terdapat Belanja Modal Lainnya TA 2021 dan TA 2020.

B.5.5 Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Gedung dan Bangunan

Tidak terdapat Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Gedung dan Bangunan TA 2021 dan TA 2020.

Belanja Bantuan Sosial Rp0

B.6 Belanja Bantuan Sosial

Tidak terdapat Belanja Bantuan Sosial TA 2021 dan TA 2020.

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

Kas di Bendahara Pengeluaran Rp0

C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Tidak terdapat saldo Kas di Bendahara Pengeluaran sampai dengan 31 Desember 2021 dan Tahun 2020. Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan saldo kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggungjawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke Kas Negara per tanggal neraca. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut:

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran

URAIAN SATKER	TA 2020
Kanwil Riau	-
Jumlah	**-**

Kas di Bendahara Penerimaan Rp0

C.2 Kas di Bendahara Penerimaan

Tidak terdapat saldo Kas di Bendahara Penerimaan sampai dengan 31 Desember 2021 dan Tahun 2020. Kas di Bendahara Penerimaan meliputi saldo uang tunai dan saldo rekening di bank yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Kas Lainnya dan Setara Kas Rp0

C.3 Kas Lainnya dan Setara Kas

Tidak terdapat saldo Kas Lainnya dan Setara Kas sampai dengan 31 Desember 2021 dan Tahun 2020. Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas pada bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP, kas lainnya dan setara kas. Setara kas yaitu investasi jangka pendek yang siap dicairkan menjadi kas dalam jangka waktu 3 bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan.

Piutang PNBP Rp0

C.4 Piutang PNBP

Tidak terdapat saldo Piutang PNBP sampai dengan 31 Desember 2021 dan Tahun 2020. Piutang PNBP merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya.

Bagian Lancar TP/TGR Rp0

C.5 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Terdapat Saldo Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) sampai dengan 31 Desember 2021 dan Tahun 2020 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp435.000. Bagian Lancar Tagihan TP/TGR merupakan Tagihan TP/TGR yang belum diselesaikan pada tanggal neraca yang akan jatuh tempo dalam 12 bulan atau kurang.

Bagian Lancar TPA Rp0

C.6 Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

Tidak terdapat saldo Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) sampai dengan 31 Desember 2021 dan Tahun 2020.

Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar Rp0

C.7 Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lancar

Terdapat Nilai Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar sampai dengan 31 Desember 2021 dan Tahun 2020 masing-masing sebesar RP0 dan (Rp2.175). Penyisihan piutang tak tertagih - piutang lancar adalah merupakan estimasi atas ketidaktertagihan piutang lancar yang ditentukan oleh kualitas piutang masing-masing debitur.

Belanja Dibayar di Muka Rp0

C.8 Beban Dibayar di Muka

Tidak terdapat saldo Beban Dibayar di Muka sampai dengan 31 Desember 2021 dan Tahun 2020. Beban dibayar di muka merupakan hak yang masih harus diterima dari pihak ketiga setelah tanggal neraca sebagai akibat dari barang/jasa telah dibayarkan secara penuh namun barang atau jasa belum diterima seluruhnya.

Pendapatan yang Masih Harus Diterima Rp0

C.9 Pendapatan yang Masih Harus Diterima

Tidak terdapat Pendapatan yang Masih Harus Diterima sampai dengan 31 Desember 2021 dan Tahun 2020, merupakan hak pemerintah atas pelayanan yang telah diberikan namun belum disampaikan tagihannya.

Persediaan Rp.20.309.383

C.10 Persediaan

Nilai Persediaan sampai dengan 31 Desember 2021 dan Tahun 2020 masing-masing adalah sebesar Rp20.309.383 dan Rp41.554.490.

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan sampai dengan 31 Desember 2021 dan Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Rincian Persediaan TA 2021 dan TA 2020

Persediaan	TA 2020	TA 2019
Barang Konsumsi	10.345.720	41.554.490
Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat	-	-
Persediaan Lainnya	9.963.663	-
Jumlah	**20.309.383**	**41.554.490**

Tagihan TP/TGR Rp0

C.11 Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Terdapat Nilai Tagihan Tuntutan Perbendaharaan /Tuntutan GantiRugi (TP/TGR) sampai dengan 31 Desember 2021 dan Tahun 2020 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp435.000. Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan kepada bendahara akibat kelalaiannya atau tindakannya yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian negara. Sedangkan Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara untuk penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara karena kelalaianya.

Tagihan Penjualan Angsuran Rp0

C.12 Tagihan Tuntutan Penjualan Angsuran

Tidak terdapat saldo Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) sampai dengan 31 Desember 2021 dan Tahun 2020.

Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang Rp0

C.13 Penyisihan Piutang Tak Tertagih –Piutang Jangka Panjang

Terdapat saldo Penyisihan Piutang tak Tertagih- Piutang Jangka Panjang sampai dengan 31 Desember 2021 dan Tahun 2020 sebesar Rp0 dan (Rp2.175). Penyisihan Piutang tak tertagih–Piutang Jangka Panjang merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Tagihan Tuntutan Perbendaharaan Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dan Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang.

Tanah Rp238.796.613.000

C.14 Tanah

Nilai aset tetap berupa tanah di lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Pekanbaru sampai dengan 31 Desember 2021 dan

Tahun 2020 adalah masing-masing sebesar Rp238.796.613.000 dan Rp236.551.186.000. Rincian Tanah sampai dengan 31 Desember 2021 dan Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2018	**Rp**	**238.796.613**
Mutasi tambah:		
Pembelian	Rp	-
Hibah	Rp	-
Transfer Masuk	Rp	-
Reklasifikasi	Rp	-
Mutasi kurang:	Rp	-
Revaluasi aset	Rp	-
Penghapusan	Rp	-
Transfer Keluar	Rp	-
Saldo per 30 Juni 2019	**Rp**	**238.796.613**

Peralatan dan Mesin Rp11.565.134.198

C.15 Peralatan dan Mesin

Nilai perolehan aset tetap berupa peralatan dan mesin per sampai dengan 31 Desember 2021 dan Tahun 2020 adalah masing-masing sebesar Rp11.565.134.198 dan Rp11.300.004.760. Mutasi nilai peralatan dan mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2020	**Rp**	**117.944.174**
Mutasi tambah:		
Penambahan Saldo Awal	Rp	-
Pembelian	Rp	-
Hibah	Rp	-
Transfer Masuk	Rp	-
Reklasifikasi Masuk	Rp	-
Perolehan lainnya	Rp	-
Reklasifikasi dari Aset Lainnya ke Aset Tetap	Rp	-
Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas	Rp	-
Mutasi kurang:		
Transaksi Normalisasi BMN Aset Tetap	Rp	-
Transfer Keluar	Rp	-
Penghentian aset dari penggunaan	Rp	-
Penghapusan	Rp	-
Saldo per 31 Desember 2020	**Rp**	**117.944.174**
Akumulasi Penyusutan s.d. 30 Juni 2019	Rp	-
Nilai Buku per 31 Desember 2020	**Rp**	**117.944.174**

Gedung dan Bangunan Rp11.113.907.175

C.16 Gedung dan Bangunan

Saldo gedung dan bangunan sampai dengan 31 Desember 2021 dan Tahun 2020 adalah Rp11.113.907.175 dan Rp0 . Mutasi transaksi

terhadap Gedung dan Bangunan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2020	**11.113.907.175**
Mutasi tambah:	
Transfer Masuk	-
Penyelesaian Pembangunan dengan KDP	-
Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas	-
Mutasi kurang:	
Penghentian Asset dari Penggunaannya	-
Saldo per 31 Desember 2020	**11.113.907.175**
Akumulasi Penyusutan s.d. 30 Juni 2019	-
Nilai Buku per 31 Desember 2020	**11.113.907.175**

Jalan, Irigasi dan Jaringan Rp0

C.17 Jalan, Irigasi dan Jaringan

Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan sampai dengan 31 Desember 2021 dan Tahun 2020 adalah masing-masing sebesar Rp0. Saldo tersebut terdiri dari jalan dan jembatan, bangunan air, instalasi dan jaringan teknologi informasi.

Aset Tetap Lainnya Rp112.181.660

C.18 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya sampai dengan 31 Desember 2021 dan Tahun 2020 adalah Rp112.181.660 dan Rp96.181.660. Mutasi transaksi terhadap Aset Tetap Lainnya per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2020	**112.181.660**
Mutasi tambah:	
Transfer Masuk	-
Mutasi kurang:	
Koreksi pencatatan	-
Saldo per 31 Desember 2020	**112.181.660**
Akumulasi Penyusutan s.d. 30 Juni 2019	-
Nilai Buku per 31 Desember 2020	**112.181.660**

Konstruksi dalam Pengerjaan Rp0

C.19 Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

Saldo konstruksi dalam pengerjaan sampai dengan 31 Desember 2021 dan Tahun 2020 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap (Rp13.370.162.861)

C.20 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap sampai dengan 31 Desember 2021 dan Tahun 2020 adalah masing-masing (Rp13.370.162.861) dan (Rp12.017.481.451). Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan.

Berikut disajikan rangkuman Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2021, sedangkan Rincian akumulasi penyusutan aset tetap disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akm. Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	Rp 11.565.134.198	Rp 10.553.348.693	Rp 1.011.785.505
2	Gedung dan Bangunan	Rp 11.113.907.175	Rp 2.816.814.168	Rp 8.297.093.007
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp -	Rp -	Rp -
4	Aset Tetap Lainnya	Rp 112.181.660	Rp -	Rp 112.181.660
5	Aset Tetap Yang Tidak Digunakan	Rp -	Rp 323.497.518	Rp (323.497.518)
	Akumulasi Penyusutan	**Rp 22.791.223.033**	**Rp 13.693.660.379**	**Rp 9.097.562.654**

Aset Tak Berwujud Rp0

C.21 Aset Tak Berwujud

Tidak terdapat Nilai perolehan Aset Tak Berwujud (ATB) sampai dengan 31 Desember 2021 dan Tahun 2020. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi secara umum tidak mempunyai wujud fisik.

Aset Lain-Lain Rp323.497.518

C.22 Aset Lain-Lain

Saldo Aset Lain-lain sampai dengan 31 Desember 2021 dan Tahun 2020 adalah Rp323.497.518 dan Rp189.633.250. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional lingkup Kanwil Akuntansi Istimewa Provinsi Papua serta dalam proses penghapusan dari BMN. Adapun mutasi aset lain-lain adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2020	**Rp**	**323.497.518**
Mutasi tambah:		
- reklasifikasi dari aset tetap	Rp	-
Mutasi kurang:		
- penggunaan kembali BMN yang dihentikan	Rp	-
- penghapusan BMN	Rp	-
Saldo per 31 Desember 2020	**Rp**	**323.497.518**
Akumulasi Penyusutan	Rp	(323.497.518)
Nilai Buku per 31 Desember 2020	**Rp**	**-**

Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya Rp0

C.23 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya sampai dengan 31 Desember 2021 dan Tahun 2020 adalah masing-masing sebesar Rp0. Rincian akumulasi amortisasi dan penyusutan aset lainnya adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Amortisasi dan PenyusutanAset Lainnya

Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan/ Amortisasi	Nilai Buku
Aset Tak Berwujud	0	0	0
Aset Lain-lain	323.497.518	323.497.518	0
Jumlah	323.497.518	323.497.518	0

Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.

Uang Muka dari KPPN Rp0

C.24 Uang Muka dari KPPN

Terdapat saldo Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2021 dan Tahun 2020 masing-masing sebesar Rp0. dan Rp0. Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) diberikan KPPN sebagai uang muka kerja yang masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

Utang kepada Pihak Ketiga Rp0

C.25 Utang kepada Pihak Ketiga

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga sampai dengan 31 Desember 2021 dan Tahun 2020 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan). Adapun rincian Utang

Pihak Ketiga pada lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Pekanbaru per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Rincian Saldo Utang kepada Pihak Ketiga

No	Uraian	Jumlah
1	Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar	Rp -
2	Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	Rp -
3	Utang kepada Pihak Lainnya	Rp -
Total		**Rp -**

Pendapatan Diterima di Muka Rp0

C.26 Pendapatan Diterima di Muka

Tidak terdapat nilai Pendapatan Diterima di Muka sampai dengan 31 Desember 2021 dan Tahun 2020. Pendapatan Diterima di Muka merupakan pendapatan yang sudah disetor ke kas Negara, namun barang/jasa belum diserahkan kepada pihak ketiga dalam rangka PNBP.

Beban yang Masih harus Dibayar Rp0

C.27 Beban yang Masih Harus Dibayar

Tidak terdapat Beban yang Masih Harus Dibayar sampai dengan 31 Desember 2021 dan Tahun 2020. Beban yang Masih Harus Dibayar merupakan kewajiban pemerintah kepada pihak ketiga yang pada tanggal pelaporan keuangan belum diterima tagihannya.

Ekuitas

Rp248.203.469.671

C.28 Ekuitas

Ekuitas sampai dengan 31 Desember 2021 dan Tahun 2020 adalah masing-masing sebesar Rp248.203.469.671 dan Rp245.294.285.663. Ekuitas adalah merupakan kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Penjelasan lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

Rincian Saldo Ekuitas TA 2020 dan 2020

URAIAN	TA 2020	TA 2019	NAIK (TURUN)
Ekuitas Awal	245.294.285.663	246.945.236.564	-1%
Surplus / Defisit - LO	(27.387.087.478)	(13.659.752.924)	100%
Koreksi yang menambah/mengurangi	2.611.148.136	(89.402.576)	-3021%
Transaksi antar entitas	27.685.123.350	12.098.204.599	129%
Jumlah	**248.203.469.671**	**245.294.285.663**	1%

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Pendapatan PNBP Rp117.944.174

Jumlah Pendapatan untuk periode sampai dengan 31 Desember 2021 dan Tahun 2020 adalah sebesar Rp117.944.174 dan Rp300.938.633. Pendapatan tersebut terdiri dari:

Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak TA 2020 dan 2020

URAIAN	TA 2020	TA 2019	NAIK (TURUN) %
Ekuitas Awal	245.294.285.663	246.945.236.564	-
Surplus / Defisit - LO	(27.387.087.478)	(13.659.752.924)	-
Koreksi yang menambah/mengurangi	2.611.148.136	(89.402.576)	-
Transaksi antar entitas	27.685.123.350	12.098.204.599	-
Jumlah	**248.203.469.671**	**245.294.285.663**	-

Pendapatan Jasa merupakan Pendapatan-LO yang diperoleh dari pelatihan akuntansi dan desain sistem akuntansi. Sedangkan Pendapatan Lain-lain-LO merupakan pengembalian beban pegawai, beban jasa, dan perjalanan dinas yang berasal dari transaksi tahun 2015.

Beban Pegawai Rp8.313.270.698

D.2 Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai sampai dengan 31 Desember 2021 dan Tahun 2020 adalah masing-masing sebesar Rp8.313.270.698 dan Rp8.386.312.004. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Rincian Beban Pegawai TA 2020
dan Tahun 2020

URAIAN JENIS BEBAN	TA 2020	TA 2019	NAIK (TURUN) %
Beban Gaji	5.693.998.637	5.802.380.600	-2%
Beban Tunjangan-Tunjangan	2.572.643.061	2.503.923.404	-
Beban Honorarium dan Vakasi		0	-
Beban Lembur	46.629.000	80.008.000	-
Jumlah	**8.313.270.698**	**8.386.312.004**	-1%

Beban Persediaan Rp214.711.570

D.3 Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan sampai dengan 31 Desember 2021 dan Tahun 2020 adalah masing-masing sebesar Rp214.711.570. dan Rp101.409.995. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk 31 Desember 2021 dan Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Persediaan TA 2020 dan Tahun 2020

URAIAN JENIS BEBAN	TA 2020	TA 2019	NAIK (TURUN) %
Beban Persediaan Konsumsi	214.711.570	89.642.500	58,25
Beban Persediaan Amunisi	0	0	-
Beban Persediaan Pita Cukai, Materai dan Leges	0	0	-
Beban Persediaan Bahan Baku	0	1.748.495	-100%
Beban Persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga	0	0	-
Beban Persediaan Lainnya	0	10.019.000	-100%
Jumlah Beban Persediaan	**214.711.570**	**101.409.995**	111,73

Beban Barang dan Jasa Rp15.540.445.467

D.4 Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan Jasa sampai dengan 31 Desember 2021 dan TA 2020 adalah masing-masing sebesar Rp15.540.445.467. dan Rp2.012.008.527. Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas, serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap, dengan rincian sebagai berikut:

Rincian Beban Barang dan Jasa TA 2020 dan TA 2020

URAIAN JENIS BEBAN	TA 2020	TA 2019	NAIK (TURUN) %
Beban Keperluan Perkantoran	966.167.138	836.821.067	15,5%
Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	0	0	0,0%
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	231.530.000	216.840.000	6,8%
Beban Barang Operasional Lainnya	62.858.950	196.300.000	-68,0%
Beban Bahan	292.682.000	227.725.000	28,5%
Beban Honor Output Kegiatan	57.160.000	46.100.000	24,0%
Beban Barang Non Operasional Lainnya	2.466.785.370	37.197.000	6531,7%
Beban Langganan Listrik	321.986.852	367.054.852	-12,3%
Beban Langganan Telepon	668.657	799.108	-16,3%
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	11.551.500	11.671.500	-1,0%
Beban Jasa Profesi	39.250.000	66.400.000	-40,9%
Beban Jasa Lainnya	11.089.805.000	5.100.000	217347,2%
Jumlah	**15.540.445.467**	**2.012.008.527**	672,4%

Beban Pemeliharaan Rp803.998.027

D.5 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan sampai dengan 31 Desember 2021 dan Tahun 2020 adalah masing-masing sebesar Rp803.998.027. dan Rp858.349.453. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian beban pemeliharaan untuk per 31 Desember 2021 dan Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Pemeliharaan TA 2020 dan Tahun 2020

URAIAN JENIS BEBAN	TA 2020	TA 2019	NAIK (TURUN) %
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	295.954.606	252.713.525	17,11
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	455.119.809	581.743.668	-21,77
Beban Persediaan Bahan Untuk Pemeliharaan	52.923.612	23.088.260	0,00
Beban Persediaan Suku Cadang	0	804.000	
Jumlah	**803.998.027**	**858.349.453**	-6,33

Beban Perjalanan Dinas

D.6 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas sampai dengan 31 Desember 2021 dan Tahun 2020 adalah masing-masing sebesar Rp1.046.830.800. dan

Rp1.046.830.800

Rp790.865.707. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk TA 2020 dan Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Perjalanan Dinas TA 2020 dan Tahun 2020

URAIAN JENIS BEBAN	TA 2020	TA 2019	NAIK (TURUN) %
Beban Perjalanan Biasa	618.909.800	762.515.707	-18,83
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	38.700.000	28.350.000	36,51
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	389.221.000	0	0,00
Jumlah	**1.046.830.800**	**790.865.707**	32,37

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Rp0

D.7 Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat sampai dengan 31 Desember 2021 dan Tahun 2020 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan entitas. Dalam hal ini, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Pekanbaru untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai akuntansi berbasis akrual yang sudah mulai diterapkan pada tahun 2015.

Beban Bantuan Sosial Rp0

D.8 Beban Bantuan Sosial

Tidak terdapat Beban Bantuan Sosial per 31 Desember 2021 dan Tahun 2020. Beban bantuan sosial merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, yang sifatnya tidak terus-menerus dan selektif.

Beban Penyusutan dan Amortisasi

D.9 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi sampai dengan 31 Desember 2021 dan Tahun 2020 adalah masing-masing sebesar Rp1.551.770.080. dan Rp1.773.906.465. Beban Penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu

Rp1.551.770.080

aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaataset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud.

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk per 31 Desember 2021 dan Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi
TA 2020 dan 2020

URAIAN BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	TA 2020	TA 2019	NAIK (TURUN) %
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	689.318.570	923.722.947	-
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	862.451.510	850.183.518	-
Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, Jaringan	-	-	-
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	-	-	-
Beban Penyusutan Penyusutan Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintah	-	-	-
Beban Penyusutan Aset Tetap yang Tidak	-	-	-
Beban Amortisasi Software	-	-	-
Beban Amortisasi ATB Lainnya	-	-	
Beban Penyusutan Aset Lain-lain	-	-	-
Jumlah Amortisasi	**1.551.770.080**	**1.773.906.465**	-
Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi	**1.551.770.080**	**1.773.906.465**	-

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih (Rp23.925)

D.10 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Tidak terdapat Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih per 31 Desember 2021 dan Tahun 2020 masing-masing sebesar (Rp23.925) dan Rp28.275. Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode.

Surplus dari Kegiatan Non Operasional Rp0

D.11 Kegiatan Non Operasional

Pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas.Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional TA 2020 dan Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Rincian Kegiatan Non Operasional TA 2020 dan Tahun 2020

URAIAN	TA 2020	TA 2019	NAIK (TURUN) %
Surplus Penjualan Aset Non Lancar			
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	0	177.789.000	-100,00
Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya			0,00
Pendapatan dari Kegiatan Non Opersional Lainnya	0	0	0,00
Beban dari Kegiatan Non Opersional Lainnya	0	0	0,00
Defisit Selisih Kurs	0	0	0,00
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	**0**	**177.789.000**	-100,00

**) Pendapatan/BebanPenyesuaian Nilai Persediaan timbul karena kebijakan penilaian persediaan menggunakan metode Harga Perolehan Terakhir. Akun ini tidak akan muncul ketika penilaian persediaan menggunakan metode First In First Out (FIFO).*

Defisit Pos Luar Biasa Rp0

D.12 Defisit Pos Luar Biasa

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas. Tidak terdapat Pos Luar Biasa per 31 Desember 2020 dan 2020.

D.PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas Awal Rp245.294.285.663

E.1 Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 31 Desember 2021 dan Per 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp245.294.285.663 dan Rp246.945.236.564

Defisit LO (Rp27.387.087.478)

E.2 Surplus (Defisit) LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan Tahun 2020 adalah defisit sebesar (Rp27.387.087.478) dan (Rp13.659.752.924). Defisit LO merupakan penjumlahan selisih antara surplus/defisit kegiatan operasional, kegiatan non operasional, dan kejadian luar biasa.

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan

E.3.1 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi

Akuntansi/Kesalahan Mendasar Rp0

/Kesalahan Mendasar

Transaksi Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 sebesar Rp0.

Penyesuaian Nilai Aset

Rp0

E.3.2 Penyesuaian Nilai Aset

Tidak terdapat Nilai Penyesuaian Nilai Aset untuk periode 31 Desember 2021 dan Tahun 2020. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan terakhir.

Koreksi Nilai Persediaan Rp0

E.3.3 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Aset Tetap merupakan koreksi kesalahan pencatatan nilai perolehan atas aset tetap yang perolehannya berasal dari tahun sebelumnya. Tidak terdapat koreksi kesalahan penilaian aset tetap per 31 Desember 2021.

Selisih Revaluasi Aset Tetap (Rp29.399.000)

E.3.4 Selisih Revaluasi Aset Tetap

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Tidak terdapat Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode 31 Desember 2021 dan Tahun 2020 sebesar (Rp29.399.000) dan Rp0.

Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi

E.3.5 Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode 31 Desember 2021 dan Tahun 2020 adalah sebesar Rp2.640.547.136 dan

Rp2.640.547.136

(Rp136.830.407). Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai.

Koreksi Lain-lain Rp0

E. 3.6 Koreksi Lain-lain

Koreksi Lain-Lain untuk periode 31 Desember 2021 dan Tahun 2020 adalah sebesar Rp0 dan Rp47.427.831. Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang. Koreksi lain-lain terdiri dari:

A. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA.

F.1 KEJADIAN-KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACA

Terdapat pengembalian atas temuan Inspektorat Jenderal berupa belanja modal yang dilaksanakan pada Tahun 2020 sebesar Rp1.550.000 dan sudah diselesaikan.

Terdapat kesalahan pencataan akun angsuran TP-TGR a.n. Angga Abdhian sebesar Rp435.000 pada potongan gaji bulan April 2020, yang mengakibatkan jurnal umum pada Saiba 2021.

Terdapat Penerimaan Negara sebesar Rp3.512.000 dari penjualan BMN berupa barang inventaris pada Kanwil Kemenkumham Riau.

F.2 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau tidak memiliki Rekening Bendahara Penerimaan.